JJ 1 (1) (2025)

Jalanjuang: Jurnal Kependidikan dan Pembelajaran

https://journal-edulearn.org/index.php/jalanjuang/index

Studi Kebijakan Pendidikan Tentang Peran Tim Manajemen Sekolah Dalam Proses Pengambilan Keputusan Kurikulum di SDN 3 JAGARAGA

Saddam Husen*
Program Studi Magister Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram

***Corresponding Author:**
Saddam Husen
Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana
Universitas Mataram, Indonesia
Email: sadamalfaruqy@gmail.com

Diajukan : 10 Juni 2025
Disetujui : 19 Juni 2025
Dipublikasi : 20 Juni 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas manajemen pengambilan keputusan kurikulum dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 3 Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *policy case study*, studi ini menelaah dinamika interaksi tim manajemen sekolah terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, guru senior, pengawas, dan komite sekolah dalam merancang dan menyesuaikan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur manajemen kurikulum yang kolaboratif memungkinkan proses pengambilan keputusan partisipatif, transparan, dan berbasis bukti; forum musyawarah rutin, penggunaan data asesmen, serta notulen dan action plan yang terdokumentasi rapi menjadi indikator utama praktik tersebut. Tantangan yang diidentifikasi meliputi rendahnya literasi kurikulum sebagian guru, keterbatasan waktu pelatihan, dan perubahan kebijakan yang cepat. Sekolah merespons melalui strategi adaptif berupa coaching clinic, komunitas belajar, pemanfaatan platform digital (PMM, Belajar.id), serta pembentukan task force kebijakan. Kepala sekolah menerapkan kepemimpinan transformasional yang mendorong budaya kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan guru dan kesiapan sekolah menghadapi perubahan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan otonomi kurikulum di sekolah dasar perdesaan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner, pengambilan keputusan berbasis data, dan penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan.

Kata Kunci: kepemimpinan transformasional, Kurikulum Merdeka, manajemen sekolah, otonomi sekolah, pengambilan keputusan kurikulum, sekolah dasar.

Pendahuluan

Sejak peluncuran kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan arah desentralisasi sistem pendidikan nasional melalui penguatan otonomi sekolah (Suryadi, 2021). Salah satu implikasi strategis dari kebijakan ini adalah pemberian keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang sesuai dengan visi–misi sekolah, karakteristik lokal, serta kebutuhan peserta didik (Pratama & Wijaya, 2022). Harapannya, kebijakan ini mampu mengikis stigma "sekolah favorit", mendorong pemerataan kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan (Sutarto & Lestari, 2021).

Namun demikian, berbagai studi mutakhir mengungkap bahwa kapasitas kelembagaan sekolah, khususnya dalam hal manajemen pengambilan keputusan kurikulum secara partisipatif dan berbasis data, masih terbatas (Hidayat et al., 2023). Di tingkat sekolah dasar, proses ini seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif tim manajemen sekolah yang mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, guru senior, pengawas, dan komite sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin strategis yang memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal (Junaedi & Fathurrohman, 2021), sementara komite sekolah berperan sebagai representasi kepentingan masyarakat, dan guru senior memberikan kontribusi melalui pengalaman pedagogis yang kontekstual (Widodo & Sudibyo, 2022).

Meski struktur formal tersebut telah terbentuk, implementasinya kerap menghadapi berbagai hambatan seperti terbatasnya pelatihan profesional, prosedur pengambilan keputusan yang belum terstandar, serta resistensi internal terhadap inovasi kurikulum (Rahayu & Mustofa, 2023). Kompleksitas ini

semakin meningkat ketika satuan pendidikan berada di wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Oleh karena itu, efektivitas pengambilan keputusan kurikulum tidak hanya bergantung pada individu pemimpin sekolah, tetapi juga pada kolaborasi lintas peran dan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

Konteks ini tercermin di SD Negeri 3 Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, yang menjadi salah satu sekolah dasar pelaksana Kurikulum Merdeka dalam lingkungan pedesaan multikultural. Keunikan konteks lokal yang melibatkan keberagaman budaya, agama, dan karakteristik sosial ekonomi menjadi tantangan sekaligus peluang dalam menerapkan kurikulum kontekstual (Fadilah & Hermawan, 2023). Sayangnya, sebagian besar kajian sebelumnya masih terfokus pada peran kepala sekolah secara individual (Arifin & Nurdin, 2024), dan belum banyak yang meneliti sinergi tim manajemen secara menyeluruh, terutama dalam konteks sekolah dasar di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) (Nugroho & Sari, 2023; Wibowo & Prasetyo, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur serta peran tim manajemen sekolah dalam pengambilan keputusan kurikulum di SD Negeri 3 Jagaraga; (2) menganalisis proses pengambilan keputusan yang ditempuh dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka; dan (3) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta strategi adaptif yang digunakan oleh sekolah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur manajemen kurikulum di jenjang sekolah dasar serta memberikan rekomendasi praktis yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi sekolah secara lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan (*policy case study*) untuk menganalisis implementasi kebijakan otonomi kurikulum di tingkat sekolah dasar (Yin, 2023). Desain ini dipilih karena dinilai mampu mengungkap secara mendalam dinamika dan kompleksitas interaksi antara aktor pelaksana kebijakan dalam hal ini tim manajemen sekolah dan konteks lokal tempat kebijakan dijalankan (Bogdan & Biklen, 2021). Fokus utama penelitian ini adalah pada proses pengambilan keputusan kurikulum sebagai bagian dari sistem kebijakan mikro yang berada dalam kerangka kebijakan makro Kurikulum Merdeka (Ball et al., 2022).

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di SD Negeri 3 Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, karena sekolah ini telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara aktif, memiliki struktur manajemen yang terorganisasi dengan baik, serta mendokumentasikan proses pengambilan keputusan kurikulum secara sistematis. Kondisi ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menelaah praktik otonomi sekolah secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Subjek penelitian terdiri dari anggota tim manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, guru kelas senior, dan pengawas sekolah. Di samping itu, komite sekolah dilibatkan sebagai informan triangulasi eksternal untuk memperkaya perspektif mengenai peran dan efektivitas pengambilan keputusan oleh tim manajemen sekolah. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan kurikulum.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, yang berperan dalam merancang, melaksanakan, dan menafsirkan proses pengumpulan data. Untuk mendukung validitas dan konsistensi temuan, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan konteks lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen terkait proses pengambilan keputusan kurikulum.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil analisis disusun untuk menggambarkan peran, dinamika, serta tantangan yang dihadapi tim manajemen sekolah dalam pengambilan keputusan kurikulum, sekaligus mengidentifikasi strategi adaptif yang diterapkan dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri 3 Jagaraga telah memiliki struktur manajemen kurikulum yang terorganisasi dengan baik. Tim manajemen sekolah terdiri dari unsur internal, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator kurikulum, dan perwakilan guru, serta unsur eksternal berupa pengawas sekolah dan komite sekolah. Unsur internal berperan dalam merancang dan menyesuaikan implementasi Kurikulum Merdeka sesuai dengan konteks lokal sekolah, termasuk menyusun program tahunan, jadwal ajar, dan perangkat pembelajaran. Sementara itu, unsur eksternal memberikan masukan

untuk memastikan bahwa keputusan kurikulum tetap relevan dengan kebijakan pusat, serta menjadi jembatan antara sekolah dan orang tua siswa dalam menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pendidikan anak. Struktur ini mencerminkan prinsip kolaboratif dalam pengambilan keputusan, sebagaimana ditegaskan oleh Bush (2020), bahwa manajemen kurikulum yang efektif di tingkat satuan pendidikan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi, legitimasi, dan kualitas keputusan.

Dalam implementasinya, mekanisme pengambilan keputusan kurikulum di SD Negeri 3 Jagaraga dilakukan secara partisipatif dan transparan melalui musyawarah rutin. Forum ini melibatkan seluruh anggota tim manajemen dan dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan, atau lebih cepat apabila terdapat perubahan kebijakan dari dinas pendidikan atau pusat. Proses diskusi dilakukan dengan mengacu pada regulasi nasional, hasil asesmen internal dan eksternal, serta refleksi kebutuhan belajar siswa. Keputusan yang diambil didokumentasikan dengan lengkap melalui notulen rapat, daftar hadir, dan tindak lanjut rencana aksi (action plan). Mekanisme ini memperlihatkan model shared decision making, sebagaimana dijelaskan oleh Leithwood dan Riehl (2016), yang menyatakan bahwa pelibatan kolektif dalam pengambilan keputusan mampu meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap implementasi kebijakan kurikulum.

Salah satu dasar pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan adalah hasil asesmen formatif dan sumatif yang dilakukan oleh guru secara periodik. Koordinator kurikulum mengintegrasikan data ini dengan laporan reflektif guru serta pemetaan kebutuhan berdasarkan Rapor Pendidikan dan Asesmen Nasional. Dengan pendekatan ini, keputusan kurikulum tidak hanya berbasis regulasi semata, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan nyata peserta didik di lapangan. Selain itu, sekolah senantiasa mengikuti petunjuk teknis terbaru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, sehingga keputusan yang diambil tetap selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku. Pendekatan berbasis bukti ini mengacu pada konsep evidence-informed decision making yang dipaparkan oleh Robinson (2011), yang menekankan pentingnya penggunaan data konkret sebagai dasar dalam manajemen pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi oleh tim manajemen sekolah dalam proses pengambilan keputusan kurikulum. Tantangan utama yang paling menonjol adalah rendahnya literasi kurikulum sebagian guru terhadap substansi dan penerapan Kurikulum Merdeka, terutama dalam pengembangan modul ajar dan pembelajaran berdiferensiasi. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat penyusunan perangkat ajar yang kontekstual dan efektif. Selain itu, keterbatasan waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pelatihan internal secara intensif. Jadwal pembelajaran yang padat serta beban administratif yang tinggi menyulitkan guru untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan. Realitas ini menunjukkan bahwa sekolah dasar masih membutuhkan strategi penguatan kapasitas guru yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Strategi adaptif yang diterapkan sekolah untuk mengatasi tantangan tersebut mencakup beberapa pendekatan. Untuk meningkatkan literasi kurikulum, sekolah menginisiasi *coaching clinic* dan forum komunitas belajar yang dilaksanakan di luar jam pelajaran reguler. Selain itu, guru diarahkan untuk memanfaatkan platform digital seperti PMM (Platform Merdeka Mengajar) dan Belajar.id untuk pengembangan mandiri berbasis micro-learning. Dalam menghadapi dinamika perubahan kebijakan yang cepat dari pusat, kepala sekolah membentuk tim kecil responsif (*task force*) yang bertugas menelaah isi kebijakan terbaru dan menyusun SOP transisi implementatif di tingkat satuan pendidikan dalam waktu kurang dari dua minggu. Pendekatan ini relevan dengan pandangan Fullan dan Quinn (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan reformasi berbasis sekolah sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas manajemen dan responsivitas terhadap perubahan sistemik.

Dari sisi kepemimpinan, kepala sekolah berperan strategis dalam menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan mendukung pengambilan keputusan yang inklusif. Ia tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga instructional leader dan fasilitator pembelajaran yang mendorong inovasi dan pengembangan profesional guru. Model kepemimpinan ini mencerminkan karakteristik transformational leadership sebagaimana dikemukakan oleh Bass & Avolio (2014), yang menekankan pentingnya inspirasi, pemberdayaan, dan dorongan perubahan dalam lingkungan pendidikan. Kepala sekolah juga aktif membangun kemitraan dengan komite sekolah dan pengawas sebagai bagian dari upaya memperkuat governance kurikulum yang terbuka dan akuntabel.

Implikasi dari sistem manajemen kurikulum yang diterapkan di SD Negeri 3 Jagaraga cukup signifikan terhadap efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti, partisipatif, dan responsif membuat sekolah lebih siap dalam menyikapi perubahan kebijakan serta lebih peka terhadap kebutuhan peserta didik. Peningkatan

keterlibatan guru dalam forum musyawarah dan refleksi pembelajaran menjadi indikasi positif adanya rasa memiliki terhadap kebijakan sekolah. Di sisi lain, upaya kepala sekolah dalam membangun budaya sekolah yang kolaboratif serta berorientasi pada pengembangan profesionalisme guru telah memperkuat fondasi keberlanjutan reformasi kurikulum di tingkat sekolah dasar. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan otonomi kurikulum di tingkat satuan pendidikan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan sekolah, pola pengambilan keputusan yang terbuka, dan kapasitas tim manajemen dalam merespons tantangan secara adaptif dan strategis.

Kesimpulan

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 3 Jagaraga sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen pengambilan keputusan kurikulum yang bersifat partisipatif, berbasis data, dan responsif terhadap konteks lokal. Struktur tim manajemen sekolah yang kolaboratif melibatkan kepala sekolah, guru, pengawas, dan komite sekolah telah menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan terarah. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi kurikulum guru dan keterbatasan waktu untuk pelatihan, sekolah berhasil mengadopsi berbagai strategi adaptif seperti coaching clinic, komunitas belajar, serta pembentukan tim responsif kebijakan. Peran kepemimpinan transformatif kepala sekolah menjadi faktor kunci dalam membangun budaya kolaborasi, inovasi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mendukung otonomi kurikulum secara berkelanjutan dan kontekstual di lingkungan sekolah dasar perdesaan.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Heri Hadi Saputra, M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pendidikan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat besar dan dapat kami aplikasikan secara efektif dalam tugas kami sebagai pendidik di berbagai tempat pengajaran.

Daftar Pustaka

ACARA. (2021). *The Australian Curriculum: A national approach to education*. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.

Atikasari, A., Sudirman, S., & Hakim, M. (2023). Profil pelajar Pancasila pada teks cerita fiksi buku siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8*(3), 5665–5672.

Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2022). *How schools do policy: Policy enactments in secondary schools* (2nd ed.). Routledge.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (5th ed.). Pearson.

Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Day, C., Hallinger, P., & Walker, A. (Eds.). (2021). *School leadership in Southeast Asia*. Routledge.

Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah*. Depdiknas.

Fadilah, U., & Hermawan, A. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Dasar, 15*(2), 112–125.

Hakim, M. (2025). Pengembangan media pembelajaran flashcard berbasis pop-up pada materi perubahan wujud benda pembelajaran IPAS kelas IV. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(2).

Hasanah, U., & Priyanto, A. (2023). Otonomi sekolah dan penguatan peran komite dalam pengembangan kurikulum. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 13*(1), 78–90.

Hidayat, R., Siregar, N., & Fauzi, A. (2023). Analisis kapasitas manajemen sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 30*(1), 1–15.

Isnaini, L. S., Mustari, M., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kreativitas guru di SMAN 1 Sakra. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 4*(3), 700–710.

Junaedi, D., & Fathurrohman, M. (2021). Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum berbasis

otonomi. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan, 4*(2), 89–104.

Kemendikbudristek. (2022). *Standar kepala sekolah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar*. Kemendikbudristek.

Kurniawan, B., Rahmawati, F. P., & Ghufron, A. (2024). Dinamika penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Tinjauan literatur sistematis. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 9*(3), 1672–1678. https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i3.1229

Leithwood, K., & Riehl, C. (2016). Leadership and policy implementation. In H. Levin & P. J. McEwan (Eds.), *Cost-effectiveness and educational policy*. Routledge.

Makki, M., & Rasmiati, T. (2018). Implementasi kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. *Jurnal Al-Ibrah, 7*(2).

Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.

Ningsih, A. K., Asrin, A., & Saputra, H. H. (2021). Peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pembelajaran pada SDN 1 Aikdewa. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 6*(4), 675–679.

Nita, G. K., Mustari, M., & Hudori, A. (n.d.). Efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 4 Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.

Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pratama, H., & Wijaya, A. (2022). Otonomi sekolah dalam pengembangan kurikulum operasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan, 11*(3), 210–225.

Priestley, M., Biesta, G., & Robinson, S. (2021). *Teacher agency in curriculum making*. Cambridge University Press.

Rahayu, D., & Mustofa, M. (2023). Resistensi guru terhadap perubahan kurikulum. *Jurnal Manajemen Perubahan Pendidikan, 15*(1), 45–60.

Robinson, V. M. J. (2011). *Student-centered leadership*. Jossey-Bass.

Robinson, V. M. J. (2020). *Instructional leadership in practice*. OECD Publishing.

Sagala, S. (2009). *Konsep dan makna pembelajaran untuk membantu memecahkan masalah belajar dan mengajar*. Alfabeta.

Saputra, H. H., & Note, H. P. (2024). Evaluasi Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 SD Negeri 6 Cakranegara. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9*(4), 2686–2697.

Setiadi, D., Wilian, S., & Sridana, I. N. (2021). Peningkatan keterampilan guru MA Al-Aziziyah Puteri Kapek, Gunungsari dalam mengembangkan instrumen asesmen sikap dan keterampilan hasil belajar. *Jurnal Interaktif: Warta Pengabdian Pendidikan, 1*(1), 20–25.

Supriyanto, A., Handayani, S., & Kurniawan, D. (2020). Peran tim manajemen sekolah dalam pengambilan keputusan kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 25*(1), 33–48.

Widodo, H., & Sudibyo, D. (2022). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum sekolah. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 12*(3), 210–225.

Wibowo, A., & Prasetyo, B. (2023). Sinergi pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum kontekstual. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, 7*(1), 12–28.

Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications* (7th ed.). Sage Publications.